

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH PERIODE 2012-2014**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:
WENING WILANTARI
B 200 130 068

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH PERIODE 2012-2014**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

WENING WILANTARI
B 200 130 068

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mujiyati', is written over a horizontal line.

Dra. Mujiyati, M.Si

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH PERIODE 2012-2014

Yang ditulis oleh:

NAMA: WENING WILANTARI

NIM: B 200 130 068




Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu, 21 Januari 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:


- | | | | |
|----------------------------------|---|--|---|
| 1. Dra. Mujiyati, M.Si | (|  |) |
| (Ketua Dewan Penguji) | | | |
| 2. Drs. Agus Endro Suwarno, M.Si | (|  |) |
| (Anggota 1 Dewan Penguji) | | | |
| 3. Dr. Triyono, SE, M.Si | (|  |) |
| (Anggota 2 Dewan Penguji) | | | |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Dr. Triyono, SE, M.Si)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 Januari 2017

Penulis



WENING WILANTARI
B 200 130 068

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH PERIODE 2012-2014

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2012-2014 dilihat dari rasio kemandirian, rasio efisiensi dan efektivitas, rasio keserasian, kemampuan keuangan daerah (*growth* dan *share*), rasio ekonomi serta rasio ketergantungan keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota. Metode pengumpulan sampel dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang diambil dari <http://www.djpk.depkeu.go.id>. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah tergolong sangat rendah dan pola hubungannya instruktif, rata-rata tingkat efektivitas keuangan daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tergolong efektif, rata-rata tingkat efisiensi tergolong kurang efisien, rasio keserasian yang menjelaskan bahwa hasil belanja rutin lebih diprioritaskan dibandingkan belanja modal, kemampuan keuangan daerah yang ditunjukkan dengan indeks *growth* dan *share* tergolong dalam kuadran II dan kuadran III yang menyebabkan kondisi belum ideal, rasio ekonomi periode 2012-2014 yang sudah tergolong ekonomis dan rasio ketergantungan keuangan daerahnya yang sangat tinggi.

Kata kunci : kinerja keuangan daerah, APBD dan rasio keuangan.

Abstract

This study aims to determine the financial performance of the local government district/city in Central Java viewed from the period 2012-2014 seen from independence ratio, the ratio of efficiency and effectiveness, compatibility ratio, fiscal capacity (growth and share), the ratio of economic and dependency ratio. The population in this study are all regencies/cities in Central Java, which totaled 35 District/City. The sampling technique used in this research is purposive sampling. These results indicate that the degree of independence of the area classified as very low and the pattern of relationship instructive, the average level of effectiveness relatively effective, the average level of efficiency is categorized as less efficient, the ratio harmony explained that the results of the ratio of recurrent expenditure a higher priority than the ratio of capital expenditure, the financial capacity of the area indicated by the index growth and share classified in quadrant II and III cause conditions have not been ideal, economic ratio are economic and financial dependency ratio of the area is very high.

Keywords: regional financial performance, APBD , and financial ratios.

1. PENDAHULUAN

Otonomi Daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Adanya Undang-Undang tersebut telah mengakibatkan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintah kearah desentralisasi yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata kepada daerah. Dalam mengelola pemerintahannya, daerah memerlukan penilaian untuk melihat apakah pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara efisien dan efektif dengan cara menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Astuti, 2015).

Penilaian kinerja pengelolaan keuangan tersebut dilakukan terhadap APBD yang dilakukan pemerintah daerah yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah tersebut adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan pada APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Nurhayati, 2015).

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah PP No. 58 Tahun 2005 (4) tentang Asas Umum Pengelolaan Daerah. APBD itu sendiri terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri bagi pemerintah (Kadek Martini, 2015). Perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran diukur dengan menggunakan beberapa rasio berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio ekonomi, kemampuan keuangan daerah dan rasio keserasian.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Anim Rahmayati, 2016), dimana obyek penelitiannya adalah APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Anim Rahmayati adalah pada obyek penelitian yang lebih luas yaitu seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah dengan periode penelitian tahun anggaran 2012-2014.

2. METODE

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Propinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota. Sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling yaitu sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang ditentukan.

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah menurut Halim (2008, h.232) menunjukkan tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh rasio kemandirian, semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, begitu juga sebaliknya. Rasio kemandirian dapat dirumuskan:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Bantuan pemerintah pusat provinsi + pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007:234). Rasio efektivitas ini

menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan seluruh sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan jumlah PAD yang telah ditargetkan. Pemerintah daerah dikatakan mampu menjalankan tugasnya bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, tetapi semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah (Rahmayati, 2016). Rasio efektivitas dapat dirumuskan:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Total penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menurut Halim (2004) adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan realisasi pendapatan (penerimaan) yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rasio efisiensi dapat dirumuskan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Kesenjangan

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase data yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2012). Rasio kesenjangan terdiri dari rasio belanja rutin terhadap total belanja dan rasio belanja modal terhadap total belanja.

$$\text{Rasio Belanja Rutin/Operasi} = \frac{\text{Belanja rutin/operasi}}{\text{Total belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja modal}}{\text{Total belanja}} \times 100\%$$

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Growth

Rasio yang dipakai untuk menghitung seberapa besar tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam menstabilkan serta meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan pendapatan bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Rumus yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan suatu daerah adalah sebagai berikut:

$$Growth = \frac{PAD \text{ tahun } t - PAD \text{ tahun } t - 1}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100\%$$

Share

Analisis share merupakan suatu bentuk analisis yang menunjukkan prioritas pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya serta pengalokasian dananya dalam bentuk pengeluaran (belanja daerah). Menurut Halim (2007:347) dalam Rahmawati dan Putra (2016), proporsi pendapatan dan belanja daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Share = \frac{PAD}{Total \text{ Belanja}} \times 100\%$$

Rasio Ekonomi

Rasio ekonomi merupakan rasio yang membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan juga memenuhi berbagai keperluan yang dibutuhkan dalam satu periode anggaran. Rasio ekonomi digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat meminimalisir input dengan mencegah terjadinya pemborosan terhadap pengeluaran (Rahmawati dan Putra, 2016). Rasio ekonomi dapat dijabarkan dengan rumus berikut:

$$Rasio \text{ Ekonomi} = \frac{Realisasi \text{ Belanja}}{Anggaran \text{ Belanja}} \times 100\%$$

Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan provinsi (Nurhayati, 2015). Rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dijabarkan dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian

Dilihat dari rata-rata rasio kemandirian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pada masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah masih sangat rendah dan pola hubungannya adalah instruktif karena rata-rata nilainya masih dibawah 25%, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerahnya. Pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan sumber PAD dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD masih rendah, sehingga ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat dan provinsi masih tinggi.

Rasio Efektivitas

Selama periode anggaran tahun 2012-2014 dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sudah efektif dalam mengelola pendapatan asli daerahnya karena nilai rasio efektivitas menunjukkan angka lebih dari 100%. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah telah mampu secara maksimal untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerahnya.

Rasio Efisiensi

Secara umum rasio efisiensi menunjukkan angka 90% - 100% berarti bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ini dalam mengelola PADnya kurang efisien. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian

tujuan realisasi pendapatan yang ditargetkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, berarti kinerja pemerintah daerahnya belum mampu mengoptimalkan efisiensi sumber-sumber pendapatan daerahnya.

Rasio Keserasian

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui juga bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin atau belanja operasi. Terlihat dari rata-rata rasio keserasian antara belanja oprasi dengan belanja modal angkanya selalu lebih besar pada belanja operasionalnya.

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Growth

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing tahun anggaran menunjukkan rata-rata indeks *growth* mengalami peningkatan yang sangat tinggi dari 26,32% tahun 2013 menjadi 51,65% pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu meningkatkan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya sehingga pertumbuhannya positif.

Share

Hasil perhitungan pada tabel diatas masing-masing tahun anggaran menunjukkan rata-rata indeks *share* sebesar 11,87% untuk tahun 2012, kemudian rata-rata indeks *share* sebesar 13,03% tahun 2013 dan sebesar 16,62% tahun 2014, sehingga hasil tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Rasio Ekonomi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio ekonomi masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun anggaran 2012-2014 berturut-turut sebesar 97,72%; 97,97% dan 99,40%. Sesuai dengan hasil tersebut maka dapat diketahui tingkat ekonomi kinerja keuangan pemerintah daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tergolong ekonomis karena berada pada interval <100%. Hal ini menggambarkan kinerja pemerintah daerahnya sudah baik dalam merealisasikan atau menggunakan dana yang ada.

Rasio Ketergantungan

Berdasarkan tabel rasio ketergantungan diatas, rata-rata hasil analisis menunjukkan bahwa dari tahun 2012 sampai 2014 tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata selama tiga tahun berada diatas 50%. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah maupun sumber pendapatan lainnya masih kurang optimal dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah, sehingga daerah masih bergantung terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan (pendapatan transfer).

4. PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2012-2014 bersifat instruktif, rasio efektivitasnya sangat efektif, rasio efisiensi kurang efisien, rasio keserasiannya masih lebih diprioritaskan untuk belanja rutin, indeks Growth mengalami peningkatan yang positif dari tahun ke tahun, indeks Share menunjukkan kondisi yang belum ideal, rasio ekonomi menunjukkan keadaan yang sudah ekonomis dan rasio ketergantungannya yang masih sangat tinggi.

Implikasi

Berdasarkan penelitian ini, implikasi yang diharapkan oleh peneliti yaitu:

- a. Dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam menentukan beberapa kebijakan dengan memperhatikan rasio-rasio keuangan mana yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya.
- b. Dapat menambah pengetahuan, wawasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti lebih mendalam mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

Keterbatasan

Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

- a. Penelitian ini hanya terbatas pada tiga periode tahun saja antara tahun anggaran 2012-2014 pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- b. Perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis rasio keuangan saja, sehingga penelitian akan berbeda bila menggunakan metode yang lain.
- c. Penelitian ini masih terbatas pada unsur APBD dengan menghitung kinerja keuangan yang digunakan pada penelitian ini hanya beberapa rasio saja, masih ada rasio-rasio kinerja keuangan lainnya yang bisa digunakan dalam penelitian sehingga hasilnya bisa lebih secara menyeluruh.

Saran

Berdasarkan simpulan, implikasi, dan keterbatasan di atas, ada beberapa saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya:

- a. Untuk mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerah, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, melakukan revitalisasi pasar dan penyuluhan kepada masyarakat arti pentingnya retribusi bagi pemerintah.
- b. Belanja rutin atau belanja operasional daerah sebaiknya ditekan dan sebaliknya belanja modal lebih ditingkatkan dalam rangka pembangunan infrastruktur daerah.
- c. Tingkat efisiensi yang tidak efisien perlu ditingkatkan dengan cara lebih meningkatkan jumlah pendapatan daerah agar dapat sesuai atau seimbang dengan realisasi pengeluaran atau belanja daerah.
- d. Tingkat belanja daerah yang tergolong ekonomis sudah baik namun perlu sedikit ditingkatkan lagi agar dapat menjadi lebih ekonomis dengan cara mengalokasikan lagi dana yang ada pada sektor-sektor yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada publik.

- e. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian yang lebih panjang dan memperluas objek penelitiannya juga agar hasilnya dapat digeneralisasikan pada penelitian selanjutnya sehingga hasilnya berbeda..

DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa, M., Basri. H., Shabri, M. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*. V(3). 30-38.
- Arsa, I.K dan Setiawina, N.D. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan pada Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006 s.d. 2013. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. XX(2). 104-112.
- Astuti, W. (2015). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Periode 2007-2011). *Jurnal EBBANK*. VI(1). 1-18.
- Binanggal, F., Palar, S.W., Lopian, A.L. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Manado Tahun 2004-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. XVI(2). 495-506.
- Halim, A. (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Pertama*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Julitawati, E., Darwanis. Jalaluddin. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*. I(1). 15-29.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi 1. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta.
- Martini, K dan Dwirandra, A.A.N.B. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *e-Jurnal Akuntansi*. X(2). 426-443.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nurhayati. (2015). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*. IV(1). 55-66.
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*. VII(13). 83-112.
- Rahmawati, N.K.E dan Putra, I.W. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. *E-Jurnal Akuntansi*. XV(3). 1767-1795.
- Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal EKA CIDA*. I(1). 40-54.

- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta. 2004.
- Republik Indonesia. 2006. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta. 2006.
- Republik Indonesia. 2013. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 *Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta. 2013.
- Saputra, S.C., Suwendra, I.W., Yudiaatmaja, F. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jember Tahun 2010-2014. *e-Journal Bisma*. IV, 1-11.
- Sijabat, M.Y., Saleh, C., Wachid, A. (2012). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). *Jurnal Administrasi Publik*. II(2). 236-242.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Sularso, H dan Restianto, Y.E. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*. I(2). 109-124.
- Wenny, C.D. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*. II(1). 39-51.
- www.djpk.depkeu.go.id